PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

(SUATU STUDI PADA DINAS PEMERINTAH KOTA BANDUNG)

EFFECT OF PARTICIPATION BUDGET AND ACCOUNTING SYSTEM FINANCIAL PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT AGENCIES

(A STUDIES ON THE BANDUNG CITY GOVERNMENT)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Ujian Sidang Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Disusun oleh:

Ferdi Zulhendri

21108040

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
BANDUNG

2014

ABSTRACT

Budget on the public sector realeted to the process of determining the amount of founds allocated to each program and activities using funds beloging to the people, where the use of central goverment use/local should make financial reports as a form of accountability. iIn the central goverment's financial reporting/area must be guided by application goverment accounting system.

The purpose of this study to determine the quality of budgetary participation, local goverment accounting system, tge performance of local goverment agencies, and also to determine the effect of budgetary participation of local financial accounting system, the performance of local goverment agencies in Bandung City Goverment.

The method used in this research is descriptive and verification methods. Descriptive method to describe the effect of budgetary particiaptionvariables, local financial accounting system, and the performance of local government agencies. While verifikatf to determine the relationship between budgetary participation variables on the performance of local government agencies, and local financial accounting system on the performance of local government agencies. To determine the effect of budgetary participation and systematic financial kauntansi area on the performance of local government agencies (Survey on Government Bandung) used statistical tests. statistical test used is the calculation of Pearson correlation, coefficient of determination, hypothesis testing using SPPS software for windows 18.

The results of this study that is quite influential menunukkan employee participation in budgeting, financial accounting system implementation complies. And with the participation in the budget making government performance becomes quite high.

Keywords: Participation Budget, Budgeting, Budget, Regional Financial Accounting System, Government Performance, Performance

ABSTRAK

Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas yang menggunakan dana milik rakyat, dimana dalam penggunaannya pemerintah pusat/daerah harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk dari pertanggung jawabannya. Dalam membuat laporan keuangan pemerintah pusat/daerah harus berpedoman pada sistem akuntansi pemerintah yang berlaku.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas partisipasi anggaran, sistem akuntansi pemerintah daerah, kinerja instansi pemerintah daerah, dan juga untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran, sistem akuntansi keuangan daerah, kinerja instansi pemerintah daerah pada Pemerintahan Kota Bandung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif untuk mengetahui gambaran variabel pengaruh partisipasi anggaran, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kinerja instansi pemerintah daerah. Sedangkan verifikatf untuk mengetahui hubungan antara variabel partisipasi anggaran terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran dan sistema kauntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah daerah (Survey pada Pemerintahan Kota Bandung) digunakan pengujian statistik. pengujian statistik yang digunakan adalah perhitungan kolerasi *pearson*, koefisien determinasi, uji hipotesis dengan menggunakan *software SPPS 18 for windows.*

Hasil dari penelitian ini menunukkan bahwa cukup berpengaruh partisipasi para pegawai dalam penyusunan anggaran, penerapan sistem akuntansi keuangan telah sesuai. Dan dengan adanya partisipasi dalam anggaran membuat kinerja instansi pemerintah pun menjadi cukup tinggi.

Kata kunci: Partisipasi Anggaran, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kinerja Instansi Pemerintah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakan Penelitian

Negara mempunyai suatu pemerintahan yang berfungsi sebagai kesatuan organisasi. Pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah mengemban amanat untuk menjalankan tugas pemerintah melalui perundang-undangan. Untuk dapat melaksanakan tujuan pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri yang disebut dengan otonomi daerah.

Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat. Partisipasi anggaran pada sektor publik terjadi ketika antara pihak eksekutif, legislatif dan masyarakat bekerja sama dalam pembuatan anggaran (Abriyani Puspaningsih:2003).

Anggaran digunakan sebagai alat untuk menetapkan kehendak pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan jalan memanfaatkan sumber daya dan dana untuk mendukung kegiatan pembangunan jangka panjang dalam bentuk anggaran tahunan. Sebanyak 433 kasus kelemahan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebanyak 158 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
2. Sebanyak 58 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan;

3. Sebanyak 116 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
4. Sebanyak 24 kasus pelaksanaan belanja diluar mekanisme APBD;
5. Sebanyak 56 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dikatakan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
6. sebanyak 8 kasus kelemahan pelaksanaan aset tetap tidak tertib (www.bpk.go.id)

Tata kelola penyelenggaran pemerintah yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang tidak terelakkan. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahannya, termasuk didalamnya kaidah-kaidah dalam pengelolaan keuangan (Wawan Sukmawan dan Lia anggarsari:2009).

Salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan penyampaian laporan pertangunang jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Akuntansi pemerintah daerah atau yang disebut juga dengan akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan (Abdul Halim:2004:35). Dalam

hal ini fenomena yang terjadi, dalam sistem akuntansi keuangan daerah sudah baik, tetapi sistem akuntansi keuangan daerah yang digunakan dalam hal pencatatannya yang masih menggunakan *single entry* (Agus Masykut:2012).

Sistem akuntansi tidak saja berfungsi sebagai alat pengendali transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi keuangan tersebut hendaknya mendukung pada pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja pada sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian stategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Hasil kinerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorng pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya (mangkunegara:2000:164).

Hasil pemeriksaan kinerja smester I Tahun 2012 menunjukkan adanya kasus senilai Rp 125.437,39 juta, yamg terdiri atas 12 kasus ketidak ekonomisan senilai Rp 76.051,87 juta, 2 kasus ketidak efisienan senilai Rp29.766,27 juta dan 66 kasus ketidak efektifan senilai Rp 19.619,25 juta (Www.bpk.go.id).

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai "**PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH".**

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah penelitian ini adalah:

1. Masih adanya kelemahan dalam pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja
2. Kurang optimalnya penerapan dalam sistem akuntansi keuangan daerah terutama dalam proses pencatatan yang kurang baiknya laporan keuangan atau anggran pemerintah daerah (LKPD).
3. Kinerja pemerintah daerah pada dinas-dinas di Pemerintah Kota Bandung belum efesien dan efektif dikarenakan oleh ketidak patuhan terhadap perundang-undangan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dirumuskan beberapa rumusuan masalah yang terjadi:

1. Bagaimana partisipasi anggaran di Pemerintah Kota Bandung.
2. Bagaimana sistem akuntansi keuangan daerah di Pemerintah Kota Bandung.
3. Bagaimana kinerja instansi pemerintah daerah di Pemerintah Kota Bandung.
4. Bagaimana pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja instansi pemerintah di Pemerintah Kota Bandung.
5. Bagaimana pengaruh sistem akunansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.2 Maksud Penelitian

Mengumpulkan data dan berbagai informasi terkait dengan pengaruh partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan sebelumnya, dihubungkan dengan permasalahan yang ada daam penelitian ini, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya partisipasi anggaran di Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui sistem akuntansi keuangan daerah di Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kineja instansi pemerintah di Pemerintah Kota Bandung
4. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja instansi pemerintah daerah di Pemerintah Kota Bandung
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah daerah di Pemerintah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbagan dalam partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Partisipasi Anggaran

Menurut Brownell dalam Sardjito dan Muthaher (2008:38) partisipasi anggaran sebagai suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya. Partisipasi anggaran adalah estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode wakru tertentu dalam ukuran financial (Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti:2010:69).

Menurut Riyadi dalam Keni dan Dewi (2008:172) partisipasi anggaran adalah tingkat keterlibatan dan pengaruh manajer dalam proses penyusunan anggaran. Sementara Siegel dan Mrconi dalam Keni dan Dewi (2008:172) menyatakan bahwa partisipasi anggaran adalah keterlibatan manajer dalam menyusun anggaran tersebut pada pusat pertanggungjawaban manajer yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran sebagai keterlibatan manajer-manajer bertanggungjawab yang berkaitan dengan penyusunan anggaran.

2.1.1.1. Manfaat Partisipasi Anggaran

Dalam suatu perusahaan partisipasi anggaran mempunyai manfaat, baik untuk perusahaan itu sendiri maupun untuk pegawainya. Manfaat partisipasi anggaran menurut A.Ikshan dan M.ikhak (2005:175) sebagai berikut:

1. Partisipasi dapat meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang lebih besar pada semua tingkat manajemen,
2. Meningkatkan rasa kesatuan kelompok, yang pada gilirannya cenderung untuk meningkatkan kerjasama antar kelompok dalam penetapan tujuan,
3. Menurunkan tekanan dan kegelisahan yang berkaitan dengan anggaran,
4. Menurunkan ketidak adilan yang dipandang ada dalam alokasi sumber daya organisasi antar subunit organisasi, serta reaksi negatif yang dihasilkan dari persepsi semacam itu.

2.1.1.2. Indikator Partisipasi Anggaran

Indikator partisipasi anggaran menurut Brownell dalam Falikhatun (2007) adalah:

1. Keterlibatan
2. Pengaruh
3. Komitmen

2.1.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.2.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah menurut Abdul Halim dalam Abdul Hafis Tanjung (2006:35) adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijjadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan.

2.1.2.2. Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Prosedur sistem akuntansi keuangan daerah menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. Antara lain:

1. Pencatatan
2. Penggolongan dan Pengikhtisaran
3. Pelaporan

2.1.3. Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kinerja

Menurut Indra Bastian (2006:274) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran,tujuan, misi, dan visi organisasi. Menurut kaus besar Bahasa Indonesia (2002:p570) kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja.

Menurut Mangkunegara, Anwar Prabu (2000:164) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut pengertian diatas maka dapat disimpulkan kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan secara kualitas dan kuantitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi selama suatu periode tertentu.

2.1.3.2 Indikator kinerja

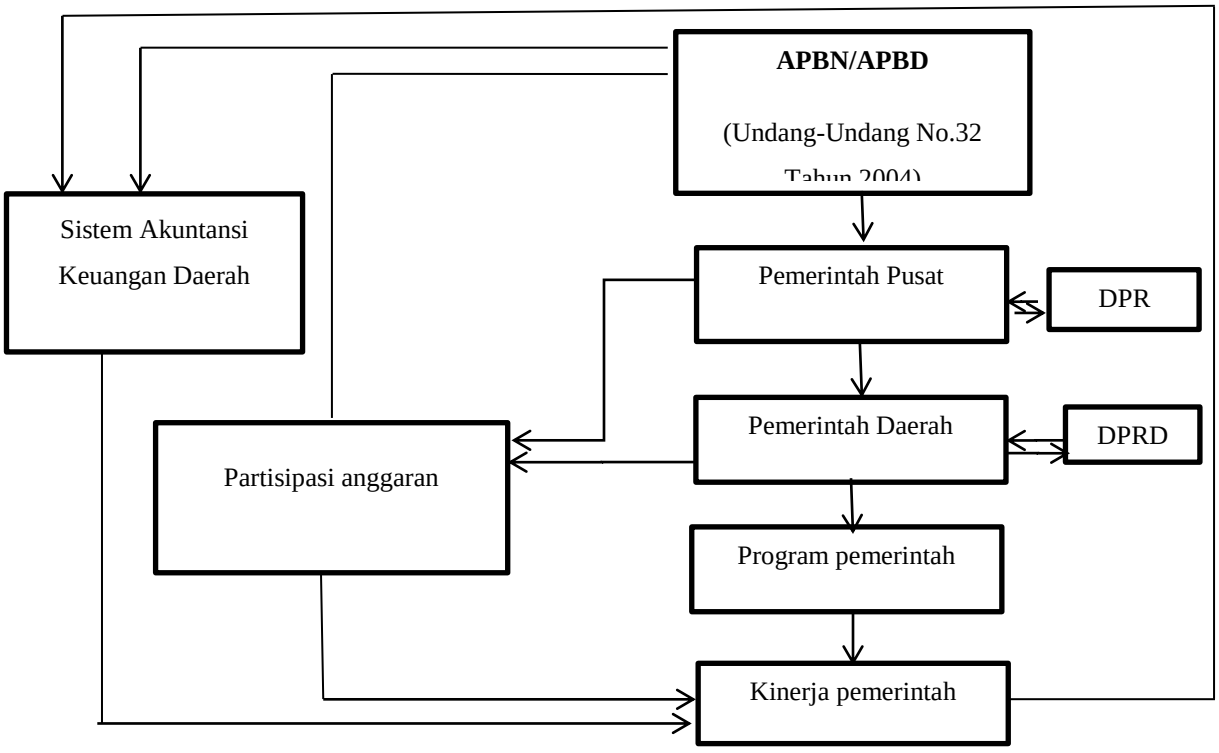
Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategis yang telah ditetapkan. Menurut Indra Bastian (2006:267) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indikator masukan (*Input*)
2. Indikator keluaran (*Output*)
3. Indikato hasil (*Outcomes*)
4. Indikator manfaat (*Benefits*)
5. Indikator dampak (*Impacts*)

2.2. Kerangka Pemikiran

Partisipasi anggaran merupakan keterlibatan seluruh manajer dalam suatu instansi untuk melakukan kegiatan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran. Dengan adanya keterlibatan tersebut akan mendorong para kasubag/kabag untuk bertanggungjawab dalam tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah daera memerlukan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana, pelaksanaan sistem ini tidak ada jaminan bahwa terdapat kesalahan atau penyimpangan.Setiap organisasi memerlukan sistem pengukuran kinerja untuk menilai pencapaian organisasi atas tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis dapat memetakan skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



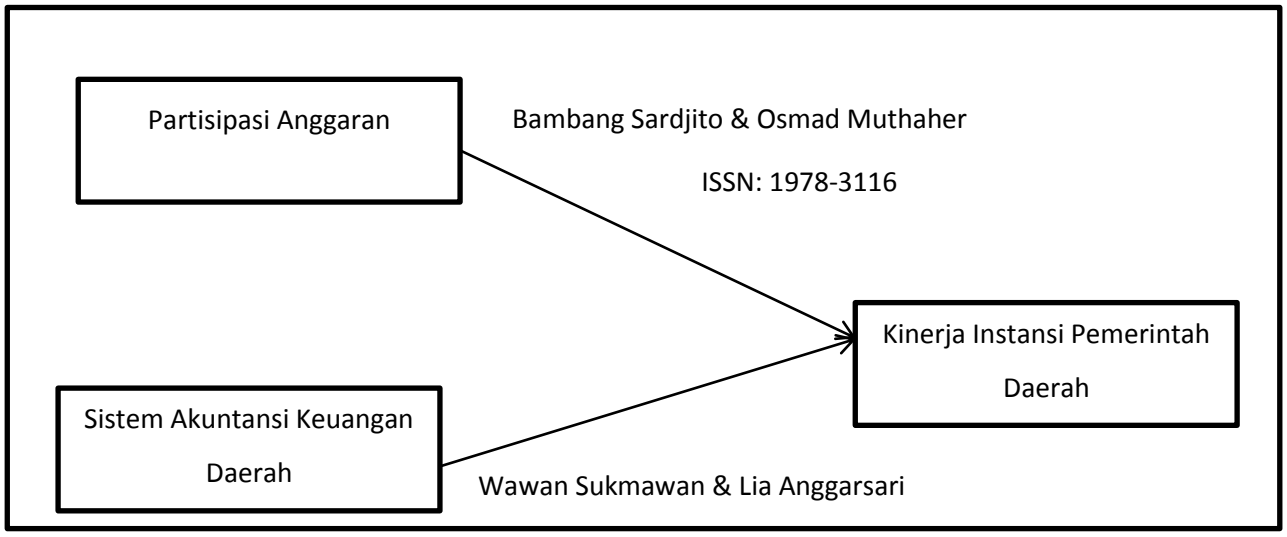
Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pengaruh Partisipasi anggaran terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Menurut Bambang Sardjito dan Osmad Muthaher (2008) dalam jurnalnya mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Semakin tinggi partisipasi anggaran akan semakin meningkat kinerja aparat pemerintah daerah.

2.2.2. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Menurut Wawan Sukmawan dan Lia Anggarsari (2009) dalam jurnalnya mengatakan bahwa pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah secara persial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah artinya sistem akuntansi keuangan daerah dapat menimbulkan dukungan yang kuat terhadap kinerja pemerintah daerah.Berdasarkan kerangka pemikiran dan pengaruh antar variabel tersebut maka penulis dapat memetakan paradigma penelitian sebagai berikut



Gambar 2.2
Skema Paradigma Penelitian.

2.3. Hipotesis

Menurut uma sekaran (2006:135) hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.

H_1 : Partisiapasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah

H_2 : Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian menurut Husein Umar dalam Umi Narimawati (2010:29) “Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan siapa yang menjadi objek peneltian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hali lain jika diperlukan”.

3.2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Menurut Sugiyono dalam Umi Narimawati (2010:29): “Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang luas”.

Sedangkan menurut Andi Supangat (2007:1), metode kuantitatif adalah: “Informasi dalam bentuk pernyataan bilangan (jumlah) yang didasarkan pada hasil perhitungan maupun hasil pengukuran dalam bentuk angka (bilangan)’.

Sesuai dengan hipotesis yang diajukan, dalam penelitian akan digunakan telaah yang cocok, untuk itu dalam analasis menggunakan regresi berganda.

3.2.1 Desain Penelitiian

Desain penelitian menurut Moh.Nazir (2003:84) bahwa:

“Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”.

Berdasarkan pengertian diatas, maka desain penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang releven.
4. Pengajuan Hipotesis
5. Metode Penelitian
6. Penyusunan instrumen penelitian
7. Kesimpulan

3.2.2. Oprasional Variabel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga variabel, yaitu:

1. Variabel Independen (X_1), variabel bebas yang keadaannya tidak dipengaruhi variabel-variabel lain. Variabel independen (X_1) dalam penelitian ini adalah partisipasi anggaran.
2. Variabel independen (X_2), yaitu baribel bebas yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Variabel independen (X_2) dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan daerah.
3. Variabel Devenden (Y), yaitu variabel bebas yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Variabel devenden (Y) yang digunakan adalah kinerja instansi pemerintah daerah.

3.2.3. Simber dan Teknik Penentuan Data

3.2.3.1. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data primer. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

3.2.3.2. Teknik Penentuan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling jenuh atau juga disebut dengan sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang penulis ambil sebanyak 17 dinas, dimana jumlah populasi sama dengan jumlah sampel.

3.2.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Lapangan (*field research*)
    a. Pengamatan langsung (*Observasi*).
    b. Wawancara
    c. Kuesioner
    d. Dokumentasi
2. Studi Keputakaan (*Library research*)

3.2.5. Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis

3.2.5.1.Rancangan Analisis

Menurut Umi Narimawati (2010:41), rancangan analisi adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data kedalam pola,

memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dimengerti.

Untuk menetapkan peringkat dalam setiap variabel penelitian, dapat dilihat dari perbandingan antara skor aktual dan skor ideal. Skor aktual diperoleh melalui hasil perhitungan keseluruhan pendapat responden, sedangkan skor ideal diperoleh dari prediksi nilai tertinggi dikalikan dengan jumalh pertanyaan kuesioner dikalikan dengan jumlah responden.

Kriteria Persentase Tanggapan Responden

No	% Jumlah Skor	Kriteria
1	20,00%-36,00%	Tidak Baik
2	36,01%-52,00%	Kurang Baik
3	52,01%-68%	Cukup
4	68,01%-84,00%	Baik
5	84,01%-100%	Sangat Baik

Sumber : Umi Narimawati (2010 : 46)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota Bandung

Kota Bandung terletak diwilayah Jawa Barat dan merupakan ibukota Propinsi Jawa Barat. Kota Bandung memiliki 26 kecamatan. Kantor Pemerintahan Kota Bandung berpusat di Jl. Wastukencana No.2 Bandung, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bandung memiliki visi dan misi yang ingin membangun dan memajukan Kota Bandung.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis didapat koefisien regresi partisipasi anggaran terhadap kinerja instansi pemerintah daerah sebesar 0.232 dan memberikan kontribusi sebesar 40,3% arah positif. Artinya partisipasi anggaran memberikan pengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

Hal ini didukung oleh Nur Faizah (2007) yang dalam penelitiannya menyebutkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja manajerial.

Pada fenomena yang terjadi masih banyaknya kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. Hal ini terjadi karena kurangnya keterlibatan para pegawai dalam partisipasi anggaran sehingga membuat pelaksanaan anggaran tidak memadai. Dengan demikian keterlibatan para pegawai sangat penting dalam

partisipasi penyusunan anggaran agar dalam pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam anggaran.

4.2.2. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis didapat koefisien regresi sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah daerah sebesar 0.145 dan memberikan kontribusi sebesar 18,9% arah positif. Artinya sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

Hal ini didukung oleh Abdul Rohman (2009)yang dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah secara persial berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pada fenomena yang terjadi penggunaan sistem pencatatan yang masih menggunakan sistem pencatatan *single entry* sehingga informasi yang diberikan terbatas dan transparansi dan akuntabilitas tidak sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu sistem pencatatan yang masih menggunakan sistem pencatatan *single entry* dapat beralih kesistem pencatatan *doble entry* dan penggunaan *acrual basis*, dimana dalam penggunaan sistem pencatatan *doble entry* dan penggunaan *acrual basis* dapat membuat transparansi dan akuntabilitas terhadap publik semakin terbuka.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah daerah (survey pada Dinas Pemerintah Kota Bandung), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah (survey pada Dinas Pemerintah Kota Bandung), dimana semakin tinggi keterlibatan pegawai dalam partisipasi anggaran akan membuat kinerja instansi pemerintah daerah (survey pada Dinas Pemerintah Kota Bandung) akan meningkat. Keterlibatan dalam partisipasi anggaran yang baik terwujud dengan keterlibatan para pegawai dalam partisipasi penyusunan anggaran.
2. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja intansi pemerintah daerah (survey pada Dinas Pemerintah Kota Bandung), dimana semakin baik dalam proses pencatatan sistem akuntansi keuangan daerah akan menghasilkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (survey pada Dinas Pemerintah Kota Bandung). Sistem akuntansi keuangan daerah yang baik terwujud dari pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran, serta pelaporan yang diberikan dapat membuat transparansi dan akuntabilitas terhadap publik semakin jelas. Semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan semakin baik juga kinerja instansi pemerintah daerah (survey pada Dinas Pemerintah Kota Bandung).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mencoba memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai bahan pertimbangan bagi pegawai pada Dinas Pemerintah Kota Bandung ataupun peneliti selanjutnya, antara lain:

1. Agar partisipasi anggaran dapat meningkatkan kinerja dengan optimal, Dinas Pemerintah Kota Bandung harus melakukan tindakan terhadap pegawai yang tidak ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Selain itu dibutuhkan kesadaran dari para pegawai itu sendiri agar dapat mengetahui target anggaran, pelaksanaan anggaran dan ketepatan waktu anggaran.
2. Sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dapat dinilai dari beberapa point tangggapan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menangani sistem akuntansi keuangan daerah, pencatatan beralih ke *doble entry* dan penggunaaan *accrual basis*. Untuk itu dibutuhkan pegawai yang berlatar belakang akuntansi agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hafiz Tanjung (2006), *Akuntansi Keuangan Daerah Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta

Abdul Halim (2004), *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi.* Jakarta: Selemba Empat

Abdul Rohman (2007), *Pengaruh Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah dan Fungsi Pemerintah Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.* Jurnal Maksi Vol.7 No.2 ISSN 1412-6680

Abdul Rohman (2009), *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Perintah Daerah (Survey pada Pemda di Jawa Tengah).* Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol.9 No.1 ISSN 1412-0852

Abriyani Puspaningsih (2003), *Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kepuasan kerja dan Kinerja Manajer: Role Ambiguity Sebagai Variabel Antara.* JAAI Vol.7 No.2 ISSN 1410-2420

Andi Supangat. 2007. *Statistika.*Kencana Perdana Media Group: Jakarta

Askam Tuasikal (2008), *Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah.* Vol.10 No.1 ISSN 1410-8623.

A.Ikhsan dan M.Ikhsan (2005), *Akuntansi Keprilakuan.* Jakarta: Selemba Empat

Bambang Pamungkas dan Eddy Supriyadi Yusuf (2007), *Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Penerapannya pada Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor).* Jurnal Ilmiah Vol.7 No.1

Bambang Sadjito dan Osmad Muthaher (2008), *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderatin.* Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.2 No.1 ISSN 1978-3116

Falikhatun. 2007. *Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Budgetary Slack dengan Variabel Pemoderasi Ketidakpastian Lingkungan dan Kohesivitas Kelompok.* Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 6 No. 2

Gujarati, Damodar (2003), *Ekonometrika Dasar* : Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.

Indra Bastian (2006), *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga

Kependagri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Serta Tata Cara Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Mangkunegara, Anwar Prabu (2000) *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Mardiasmo (2002), *Akuntansi Sektor Publik* Yogyakarta: Andi Offset

Maria A. Leach-Loves, William W. Stammerjohan dan Kyoo Sang Lee (2007), *Budget Participation and Job Performance of South Korean Managers Mediated by Job Satisfaction and Job Relevant Information.* Jurnal Ekonomi dan Bisnis ISBN 978-0-9742114-9-7.

Moch. Nazir (2003), *Metode Penelitian*. Jakarta: Selemba Empat

Nur Faizzah dan Titik Mildawati (2007), *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan Variabel Pemoderasi Gaya Kepemimpinan dan Komitmen Organisasi pada PEMKOT Surabaya.* JAMBSP Vol.3 No.3 ISSN 1829-9857.

Siti Anis Musyarofah. 2006. *Strategi nafkah rumah tangga miskin perkotaan (Studi Kasus Kampung Sawah, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara*

Stefani Lily Indarto dan Stephana Dyah Ayu (2011), *Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Perusahaan Melalui Cakupan Anggaran, Komitmen Organisasi, Komitmen Tujuan Anggaran dan Job Relevant Information (JRI).* Jurnal Ilmiah Vol.14 no.1.

Sugiyono (2006), *Statistika Untuk Penelitian.* Bandung: Alfabeta

Sugiyono (2009), *Statistik untuk Penelitian.* Cetak Keduabelas. Bandung: Alfabeta

Sugiyono (2010) *Metode Penelitian Kuantitatif Kuaitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Uma Sekaran, 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Edisi 4. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat

Umi Narimawati, Sri Dewi A., & Lina I. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah.*Jakarta:Penerbit Genesis

Umi Narimawati. 2008. *Analisis Multifariat Untuk Penelitian Ekonomi.*Yogyakarta :Penerbit Graha Ilmu.

Umi Narimawati.2010. *Metode penelitian :Dasar Penyusunan Penelitian Ekonomi.* Jakarta: Penerbit Genesis.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Wawan Sukmawan dan Lia Anggarsari (2009), *Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survey pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya).* Jurnal Akuntansi Vol.4 No.1 ISSN 1907-9958

www.klik-glamedia.com

www.bpk.go.id